

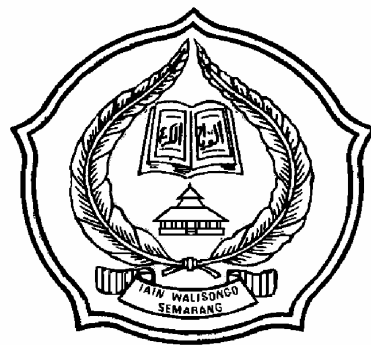
**STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO. 1072 / PID.B / 2004 / PN. SMG TENTANG
TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

LATIFATUDDINI

2104012

JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Si.

Desa Tlogorejo Rt. 2 Rw. 12 Karangawen Demak

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

Perum Sawangan Elok BF 11 No. 16 Duren Mekar Sawangan Depok Jawa Barat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Akhmad Hufron Nur

**Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di – Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Latifatuddini

Nim : 2104012

Judul : STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO. 1072 / PID.B / 2004 / PN. SMG TENTANG
TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Mei 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Si.
NIP. 150 216 494

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 150 289 443



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Latifatuddini
Nomor Induk : 2104012
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO. 1072 / PID.B / 2004 / PN. SMG TENTANG
TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

23 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1
tahun akademik 2008/2009

Semarang, 23 Juni 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 150 267 747

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 150 289 443

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Si.
NIP. 150 216 494

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 150 289 443

MOTTO

:

()

Artinya: “Rasulullah SAW. melarang kita merusakkan mata uang yang berlaku dikalangan muslimin, terkecuali jika ada pemalsuan”. (H.R. Ahmad, Al-Muntaqa 11 : 354)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2009

Deklarator,

Latifatuddini

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana sederhana dalam manggapai cita, takkan berarti tanpa kehadiran mereka. Penulis persembahkan pada:

- ❧ *Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi serta materi.*
- ❧ *Bapakku tercinta yang selalu ada dihatiku.*
- ❧ *Kakakku Zaki yang tercinta yang selalu memberi semangat dan do'anya.*
Ponakanku Dohan dan semua keluarga besarku yang telah membantu.
- ❧ *Seseorang yang di dalam hatiku, terima kasih atas do'a dan motivasinya.*
- ❧ *Semua pihak yang telah membantu.*

ABSTRAK

Pemalsuan yang ditinjau dari asal kata, terdiri dari pemalsuan dan uang, pemalsuan itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang membuat sesuatu menjadi tidak tubn. Dan seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang akan terkena saksi ancaman pidana menurut KUHP. Kejahatan pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi beredar secara luas dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian negara itu sendiri serta merugikan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/Pid/B/2004/PN.Smg. yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Nomor 1072/Pid/B/2004/PN.Smg, tentang tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenal tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analitis. Sumber datanya berupa data primer yaitu putusan pengadilan negeri semarang nomor 1072/Pid/B2004/PN.Smg, dan sumber data sekundernya berupa buku-buku dan aturan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengedaran uang palsu. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis content analisis. Pertimbangan hukum majelis hakim menggunakan pasal 244 dan pasal 245 dan dikenakan sanksi bagi pelakunya dengan hukuman penjara 15 tahun dalam pertimbangan hukum saya kira putusannya sangat memberatkan si terdakwa walaupun dia juga pernah melakukan residivis tetapi majelis hakim mengurangi hukuman si terdakwa sesuai ancaman hukum pidananya. Menurut tinjauan hukum pidana Islam bahwa syariat Islam menjatuhkan sanksi terhadap pidana (jarimah) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan ta'zir tindak pidana pemalsuan uang dalam hukum Islam termasuk ta'zir yang mana ta'zir merupakan sesuatu kewenangan ulil amri (pemerintah), dalam hal ini hukumlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa memandang pelakunya baik pejabat maupun masyarakat biasa. Serta tunduk dan patuh kepada syari'at Islam untuk mematuhi hak Allah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 1072 / PID.B / 2004 / PN. SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha dengan segala daya dan upaya serta dengan segala kemampuan yang ada untuk menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini tidak mungkin terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M.A pengemban rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag H selaku dosen pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala kebaikan jasa-jasanya, penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali iringan doa *jazakumullah ahsanul jazai*, semoga amal baktinya diterima di sisi Allah dan dapat balasan yang setimpal.

Akhirnya kepada Allah semata penulis memohon pertolongan. Karya ini jauh dari kesempurnaan yang idealnya diharapkan, maka dari itu saran konstruktif dan masukan positif demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

Semarang, 7 Juli 2009

Penulis,

LATIFATUDDINI
2104012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan penulisan skripsi	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG (<i>JARIMAH</i>) PENGEDARAN UANG PALSU	
A. Pengertian, Dasar–dasar, Macam–macam dan unsur–unsur <i>Jarimah</i>	13
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	13
2. Dasar-dasar <i>Jarimah</i>	14
3. Macam-macam <i>Jarimah</i>	16
4. Unsur-unsur <i>Jarimah</i>	31
B. Hukum Pidana Positif Tentang Pengedaran Uang	33
1. Pengertian tindak pidana pengedaran uang palsu	33
2. Ciri-ciri Pengedaran uang palsu	38
3. Dasar dan alasan hukum pidana peneggaran uang palsu	49

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 1072 / PIDB / 2004 / PN. SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU

A. Sekilas Pandangan Pengadilan Negeri Kota Semarang	56
1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang	56
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kota Semarang..	60
B. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072 / PIDB / 2004 / PN. SMG Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu	62
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072 / PIDB / 2004 / PN. SMG	64

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 1072 / PIDB / 2004 / PN. SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072 / PIDB / 2004 / PN. SMG yang Berkaitan dengan KUHP Pada Pasal 245 Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu.....	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072 / PIDB / 2004 / PN. SMG Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu.....	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	89
C. Penutup	90

BAB I

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 1072/PID/B/2004/PN/SMG

TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan kejahatan, masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem-sub sistem ini memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antara sub sistem ini dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan tersebut di biarkan maka lambat laun akan terakumulasi dalam sikap dan menimbulkan perbuatan jahat yang di kenal dengan kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan merupakan semua bentuk, ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).¹

Aturan hukum yang mengatur tentang mata uang dan kejahatan terhadap mata uang di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru. Di masa pemerintahan Hindia Belanda, pernah berlaku Indische Muntwet 1912 sebagai undang-undang yang mengatur mata uang yang tetapi diberlakukan pada masa

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990, hlm. 38.

awal kemerdekaan republik indonesia.² Kejahatan pemalsuan mata uang seharusnya tidak di pandang semata-mata sebagai suatu kejahatan pemalsuan sebagaimana pemalsuan dokumen, sebab kejahatan pemalsuan mata uang merupakan kejahatan yang berdampak luas karena yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya dan kejahatan terhadap mata uang memiliki akibat langsung terhadap menurunnya kemampuan ekonomi korban.³

Salah satu bentuk kejahatan tindak pidana yang saat ini semakin meningkat adalah pengedaran mata uang palsu yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok-kelompok kecil maupun oleh sindikat. Meningkatnya tindak pidana pengedaran uang palsu tidak dapat di pisahkan dari perkembangan sosiokultural masyarakat. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa semakin kompleks pula persoalan-persoalan yang muncul di dalamnya, masyarakat dapat di bagi dalam kelompok-kelompok dengan atau tanpa kekuasaan sistem yang sah dan berfungsi di bagi bersama-sama mengatur sosial yang timbul.⁴

Di dalam hukum Islam juga menerangkan tentang pengedaran uang palsu yang isinya dapat di simpulkan empat pendapat dai para fuqaha anshar (negara-negara besar), pertama : bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian, kedua : Penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan, ketiga : Pemilihan antara

² Makalah Seminar dalam Buletin *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 1, April, 2006.

³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴ Adam Shazawi, *Kejahatan Mengenal Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 21.

jumlah yang sedikit dengan yang banyak, keempat: kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya.⁵

Dalam Islam uang juga dapat di definisikan sebagai sebanyak suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual belikannya uang palsu.⁶

Dalam putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/PID/B/2004/PN.SMG tentang tindak pidana pengendalian uang palsu maka dapat dijelaskan bahwa terdakwa Suripan bin Wadiran dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu atau yang dipalsukan sebagai uang asli atau tidak dipalsu serta barang secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu atau yang dipalsukan sebagai uang asli atau tidak dipalsu serta barang bukti berupa 191 lembar pecahan RP. 100.000-, dan 1 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000-, dirampas untuk dimusnahkan. Bahwa dari hasil keseluruhan di persidangan, ternyata saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 245 KUHP.

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana pencuri keuangan negara merupakan perkara yang merugikan kemaslahatan rakyat banyak tapi disisi lain juga berbenturan kepentingan individu yakni

⁵ Al-Imam Asy-Asyafi'i, RA. *Terjemah Al-Umm*, Jilid IV, CV. Faizan, tt.h., hlm. 56.

⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

ketika terdakwa mengakui bahwa hal ini dilakukan karena untuk kepentingan keluarga. Oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka majelis berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun potong tahanan.

Dalam hukum Islam apabila seseorang melakukan tindak pidana yang perbuatan tersebut berbenturan antara kemaslahatan rakyat banyak dan kemaslahatan individu. Hal ini seperti yang dilakukan Umar ketika batal menghukum orang yang melakukan pencurian karena ia menghidupi keluarganya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Studi analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/PID/B/2004/PN. SMG. Tentang tindak pidana pengedaran uang palsu

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 1072/PID/B/2004/PN/ SMG Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu yang berkaitam dengan KUHP Pasal 245 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulis mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 1072/PID/B/2004/PN/ SMG Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu yang berkaitan dengan KUHP Pasal 245 dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Nomor 1072/PID/B/2004/PN/SMG, tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu.

D. Telaah Pustaka

Penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku, skripsi dan artikel yang ada relevansi dengan permasalahan yang diangkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka dari itu pernah dilakukan validitasnya.

Dalam skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca buku-buku dan artikel sebagai berikut:

Pertama, buku karya Iswardono yang berjudul “Uang dan Bank”. Buku ini menjelaskan bahwa uang berupa sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang juga sebagai kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan

untuk membayar sejumlah tertentu, hutang dengan kepastian dan tanpa penulisan.⁷

Dengan adanya pembentukan dan penggunaan dari penghasilan tadi terwujud lah suatu arus yang disebut sebagai pengedaran atau sirkulasi uang. Dimana uang akan beredar, terus berpindah tangga dan akan mengalami pertimbangan sesuai dengan bertambahnya kegiatan ekonomi.⁸

Kedua, buku karya Moh. Anwar yang berjudul “Tindak pidana di bidang perbankan”. Perbankan merupakan prasarana di bidang pembangunan ekonomi karena setiap pembayaran atas biaya pembangunan dilakukan melalui bank yang usaha pokoknya memberikan jasa dalam lalu lintas pembangunan dan peredaran uang, disamping memberikan kredit.⁹

Ketika, buku karya Phratama Raharja yang berjudul uang dan perbankan. Segala sesuatu yang sudah memenuhi definisi uang di atas dapat kita anggap sebagai uang baik terbuat dari logam, kertas ataupun dari benda lainnya, bilamana ia sudah diterima oleh umum (masyarakat) sebagai alat penukar, alat pengukur nilai dan sebagai alat penyimpan kekayaan, kita anggap sebagai uang.¹⁰

Skripsi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang yang bernama Novita Damayanti, Nim : 88.101.10259 angkatan 1993 dalam karya ilmiahnya mengangkat tentang ” Penerapan pasal 64 KUHP Tentang Perbuatan Berlanjut Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang

⁷ Iwardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: Gajah Mada, 1985, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

⁹ Brigjen, Pol. Drs. H. A. K. Moch Anwar, SH., *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: 1986, hlm. 18.

¹⁰ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987, hlm. 7.

di Pengadilan Negeri Boyolali'', dalam penelitiannya menjabarkan yang berisi bahwa dari beberapa kasus tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali ternyata tiap kasus dilakukan lebih dari satu orang hingga Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya juga menghubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP dimana tidak saja sipelaku atau pembuat tetapi juga orang yang turut serta telah pula diajukan ke sidang Pengadilan sebagai terdakwa yang dikenal dalam ketentuan Pasal 64 KUHP yaitu sebagai terdakwa yang secara berlanjut atau kejahatan ulangan dari perbuatan dan terlibat dalam tindak pidana pemalsuan uang.

Skripsi yang disusun oleh saudara Windri Kurnia Purnanto, Nim : 03.203.6307 , mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2002 '' Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang di wilayah (hukum Polwiltabes Semarang)'' yang berisi bahwa untuk mengatasi masalah meningkatnya peredaran uang palsu di masyarakat, diperlukan peran aparat kepolisian sebagai penyidik kepolisian menurut Pasal 6 UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP. Aparat kepolisian pada hakikatnya memiliki kedudukan sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, demikian pula dalam hal menaggulangi merebaknya tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu, aparat kepolisian berperan untuk membongkar jaringan pemalsuan uang yang belum terungkap.

Jadi, tindak pidana pemalsuan uang itu sangat membahayakan perekonomian negara maupun masyarakat dan dapat mengacaukan jalannya pembangunan. Oleh karena itu harus dicegah dan diberantas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya. Maka dari itu untuk menjadi sebuah kategori skripsi yang memenuhi kualifikasi dan kriteria karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahan isinya, maka penulis mengumpulkan data skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu, dengan jumlah melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan hal itu maka ditempuh library research, yang menurut Bambang Sunggono adalah Suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹¹ Dalam penelitian ini menitikberatkan pada dokumen. Penelitian dokumen adalah Penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi : arsip, data resmi instansi pemerintah, data yang dipublikasikan (keputusan Pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).¹² Penelitian ini dilakukan dengan

32. ¹¹ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.

¹² *Ibid* hlm. 33

mengkaji sumber tertulis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 1072/Pid.B/2004/PN.Smg tentang Tindak pidana pengedaran uang palsu.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 1072/Pid.B/2004/PN.Smg tentang Tindak pidana pengedaran uang palsu.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah untuk memperoleh data skunder, yaitu jenis data yang diperoleh tidak langsung dari obyek penelitian.¹³

Dalam penelitian ini, misalnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut seperti buku-buku yang berkaitan dengan pemalsuan uang palsu, dan perbankan, KUHP.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui interaksi dan komunikasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univ. Indonesia, Jakarta: 1986 hlm

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Dalam hal ini pewawancara akan mewawancarai Hakim yang telah menangani perkara atas Putusan No. 1072/PID/B/2004/PN.SMG. Tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

b. Metode Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, majalah, dan sebagainya.¹⁵ Dalam hal ini dengan menelusuri berkas surat putusan No. 1072/PID/B/2004/PN.SMG. Tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

4. Metode analisa data

Menganalisa data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan atau kesimpulan.¹⁶ Penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam hasil penelitian diolah dalam bentuk deskriptif analisis. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 164.

¹⁵ Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 120.

¹⁶ Ronny Hanitejo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang Galia Indonesia, 1982, hlm 83.

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi

Bab II Tinjauan umum tentang (*jarimah*) pengedaran uang palsu

Dalam bab ini dibahas tentang pengertian jarimah, macaw-macaw jarimah, unsur-unsur jarimah. Dan hukum pidana positif tentang pengedaran uang palsu meliputi pengertian tindak pidana pengedaran uang palsu, ciri-ciri pengedaran uang palsu, dasar dan alasan hukum pengedaran uang palsu.

Bab III Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 1072/PID/B/2004/PN.SMG Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Dalam bab ini dibahas tentang sekilas pandangan pengadilan negeri kota Semarang meliputi sejarah pengadilan negeri kota Semarang, tugas dan wewenang pengadilan negara. kota Semarang, putusan pengadilan negeri Semarang nomor 1072/PID/B/2004/PN.SMG tentang tindak pidana pengedaran uang palsu yang berkaitan dengan KUHP pasal 245, dasar pertimbangan hukum pengadilan negeri Semarang nomor 1072/PID/B/2004/PN.SMG.

Bab IV Analisis terhadap putusan pengadilan negeri Semarang nomor 1072/PID/B/2004/PN.SMG tentang tindak pidana pengedaran uang palsu

Dalam bab ini dibahas tentang analisis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan negeri Semarang Nomor 1072/PID/13/2004/PN.SMG tentang tindak pidana Pengedaran uang palsu, analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/PID/13/2004/PN.SMG tindak pidana pengedaran uang palsu.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan, saran-saran, penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *JARIMAH* MENGENAI TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU

A. Pengertian, Dasar-dasar, Macam-macam dan Unsur-unsur Jarimah

1. Pengertian *Jarimah*

Yang dimaksud dengan kata-kata “*jarimah*” ialah larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana, delik) pada hukum pidana positif dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan fuqoha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya.¹

Artinya: “*Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh allah dengan hukuman had atau ta’zir.*”²

Tindak pidana (*jinayah*) ialah perbuatan yang menyangkut masalah pembunuhan dan pemotongan (pemukulan) serta perbuatan *jinayah* lainnya. Dan tindak pidana yang menyangkut badan dan sedangkan yang menyangkut harta benda, kehormatan, keturunan, dan lain sebagainya.³

¹ Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993, hlm. 1.

² M. Abu Zahrah, *Al-Jarimah al-Uqubah fi al-Fiqhal-Islami*, Beirut: Dar al Fikr Araby, t.t., hlm. 29.

³ Zainuddin Bin Abdul Aziz dan Al-Maubari al-Fananni, *Terjemah Fathul Mu’in*, Jilid II, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, hlm. 1056.

Menurut istilah fiqih *jarimah* adalah larangan syara' yang diancamkan dengan hukuman, baik karena mengerjakan pekerjaan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan seperti mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya. Tujuan *jarimah* yang utama adalah untuk mengubah agar seseorang tidak melanggar (perintah atau larangan).⁴

Jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at melakukannya perbuatan yang dilarangnya ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus dihindari karena perbuatan itu menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (inteligensi), harga diri dan harta benda.⁵

Menurut Abdul Qadir berkata:

Artinya: "*Jinayah adalah perbuatan yang melanggar hukum syara' seperti kejahatan terhadap jiwa (pembunuhan, penganiayaan) maupun kejahatan pada harta benda maupun kejahatan pada bentuk lainnya.*"⁶

2. Dasar-Dasar *Jinayah*

Di kalangan para ulama dasar hukum (legalitas) ini adalah suatu konsekuensi logis dari persyaratan seorang mukalaf (subyek hukum) dan perbuatan mukalaf.

⁴ M, Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 157.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz X, Bandung: Penerbit Al-Ma'arif, 1990, hlm. 11.

⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tafsir Jami'y Islam*, Juz I, Bairut: Darul Kutub Arroby (tt), hlm.67.

Seperti diketahui bahwa salah satu syarat mukalaf adalah mampu memahami dalil (aturan) yang mewajibkan dan melarang perbuatan. Syari'at ini sudah tentu mengharuskan aturan-aturan tersebut ada lebih dahulu untuk dipahami dan dimengerti.

Sedangkan perbuatan yang diwajibkan atau dilarang itu harus diketahui dengan melalui aturan agar bisa ditaati dengan cara meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang diwajibkan, hal ini pun mengharuskan adanya aturan lebih dahulu oleh karena itu Abdul Qadir Audah menyimpulkan dalam kaidah:

Artinya: "*Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan*".⁷

Dasar hukum (legalitas) *jarimah* adalah:

a. Al-Qur'an

Artinya: "...*dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.*" (QS. al-Isra': 15)

Artinya: "*Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka...*" (QS. al-Qashash: 59)⁸

b. Kaidah Fikih

⁷ Abdul Kadir Audah, *op.cit.*, hlm. 82.

⁸ Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 619.

Artinya: “*Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan.*”

()

Artinya: “*Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakaknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.*” (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Naza’i, dan Baihaqi serta disahihkan oleh Hakim)⁹

3. Macam-Macam *Jinayah*

a. *Jinayah hudud*

Penggolongan tersebut didasarkan atas berat ringannya hukuman.

1) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari *hadd*, artinya larangan. Biasanya juga digunakan sebagai kata yang bermakna “pembatas antara dua hal”, atau yang membedakan sesuatu dari selainnya.

Demikian pengertian hudud, menurut istilah para ahli fiqih, yang menjadi topik pada pembahasan ini. Adapun menurut pengertian pembuat syari’at, adalah lebih umum dari pada itu,

⁹ Abu Dawud Sulaiman ibn Asy’Ats As-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, Dar al-Fikr: t.th., hlm. 129.

karena yang dimaksud dengannya adakalanya sebagai saksi, dan adakalanya yang dimaksud adalah pelarangan itu sendiri.¹⁰

a) Zina ()

Perbuatan zina adalah jika seorang lelaki memasukkan kepala kemaluannya ke dalam lubang kemaluan atau dubur wanita, sementara kedua orang itu bukan suami-istri dan tidak ada kesamaran saat melakukannya.

Dalam penentuan status *muhshan* ini, seorang tidak disyaratkan beragama Islam sehingga seorang kafir *muhshan* yang berzina juga dihukum rajam sebagaimana halnya seorang muslim.

:

:

)

(

Artinya: “Dari Ubaidah Ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan jenda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (Hadits diriwayatkan oleh Jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i)¹¹

¹⁰ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 428.

¹¹ Abu Dawud Sulaiman ibn Asy’Ats As-Sajastani, *op.cit.*, hlm. 144.

Dalam penentuan status *Ghair Muhshan* ada dua macam hukuman yaitu:

- (1) Dera 100 kali, dan
- (2) Pengasingan selama satu tahun
- (3) Murtad (*al-Riddah*)

Al-Riddah berarti menolak agama Islam dan memeluk agama lain melalui perbuatan atau secara lisan, dengan demikian murtad mengeluarkan seorang dari lingkungan Islam.¹²

b) Perampok (*harabah*) ()

Jarimah harbah dapat terjadi dalam kasus yang seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dari mengatakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.¹³

c) Pencurian ()

Pencuri adalah orang mengambil harta dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki, pengertian dimaksud ada beberapa perilaku manusia yang serupa tidak

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 30.

¹³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008, hlm. 204.

sama dengan pencuri, seperti halnya menipu, korupsi, dan menyuap.¹⁴

Dasar hukum penjatuhan sanksi bagi *jarimah as-sariqah* adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 38:

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹⁵

Penggantian pengertian dapat dinamakan hukuman:

(1) Penggantian kerugian (*dhaman*)

Pengertian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila tidak dikenakan hukuman potong tangan.

(2) Hukum potong tangan ()

Hukum potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh *ulil amri* menurut mereka hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).¹⁶

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 62.

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 547.

¹⁶ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 62.

(3) *Qadzaf* (melempar dengan batu dan lainnya)

Yang dimaksud dengan *qadzaf* (القذف) ialah tuduhan melakukan perzinaan tidak benar. Bila seseorang melaporkan tuduhan kepada seseorang melakukan zina dan dia yakin kebenaran tuduhannya itu dan untuk itu dia mampu mendatangkan empat orang saksi, maka tuduhan itu tidak disebut dalam arti *qazdaf* karena yang demikian berarti melaporkan terjadinya perzinaan.

Ancaman hukuman *qazdaf*

- (a) Hukuman pokok yakni didera sebanyak 80 kali yang ditetapkan
- (b) Hukuman tambahan yakni tidak diterima untuk selamanya dan terhadap siapa saja.¹⁷

d) Minuman *Khamr* ()

Hukuman peminum *khamr* yaitu:

- (1) Memukul (menjilit) dengan dua pelepah kurma kira-kira sebanyak 40 kali jilitan
- (2) Sesungguhnya saringan-saringannya hukuman peminum *khamr* itu sebanyak 80 pukulan.¹⁸

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 547.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta; Prenada Media, 2003, hlm. 284.

. . . :

,

.

Artinya: “*Pada imam Muslim dari Ali Putra Abu Thalib ra. Disebutkan “Rasulullah SAW, telah melaksanakan penjiltan bagi peminum khamr sebanyak 40 kali, Abu bakar sebanyak 40 kali itu, dan Umar sebanyak 80 kali. Semua itu adalah sunnah Rasul Allah dan Khulafaur rasyidin” dan aku lebih senang dengan hukum yang dilakukan Umar.*”¹⁹

2) Jarimah Qishas diyat

Adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas diyat*.

Hukuman dalam *qishas diyat* yaitu:

a) Hukuman pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-amd*)

Hukuman bagi pembunuhan sengaja ada empat macam yaitu hukuman mati atau tidak memaafkan, ganti rugi bahwa si korban dan walinya memaafkan, memerdekakan budak, hukuman berupa terhalang dari hak mewarisi dan hal menerima wasiat.

b) Hukuman pembunuhan semi sengaja (*al-Qatl syibhal-amd*)

Hukuman bagi pembunuhan semi sengaja adalah diyat yaitu ganti rugi yang berupa 100 ekor unta dan sapi kepada si korban dan membayar *kafarat*.

¹⁹ Moch Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, t.t., hlm.645.

c) Hukuman pembunuhan tidak sengaja (*al-Qatl al-Khafa'*)

Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja adalah *diyat* dan membayar kafarat, yakni memerdekakan budak dan berpuasa dua bulan berturut-turut.²⁰

3) *Jarimah ta'zir*

Pengertian *jarimah ta'zir* adalah hukuman atas tindak dan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya dari satu segi. *Ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.²¹

Sebagai dasar hukumnya adalah QS. Fath: 8-9

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ (9-8 :)

Artinya: “Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. Fath: 8-9)²²

²⁰ Rakhmadi, *Resktulaisasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2005, hlm. 45.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Himpunan Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 248.

²² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.

Menurut Istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh al-Mawardi sebagai berikut:

Artinya: "*Ta'zir hukumnya yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.*"²³

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarimah* di ancam dengan hukuman *had*, *kifarat* dan *qisas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*, *jarimah ta'zir* dibagi satu yaitu:

Pertama: *jarimah* atau bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash. Qur'an dan hadits tetap hukumnya diserahkan kepada nash. Syara; tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetap hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sekurang-kurangnya sampai seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatannya akan dianggap sebagai *jarimah*, seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dengan syariat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan syara') prinsip-prinsip umum. Dengan

²³ Imam Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 457.

maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.²⁴

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang. Selamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetap, *jarimah ta'zir* macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

Macam-macam *jarimah ta'zir*

a) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan *bil qisasy* dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyat* dan *bil qishas diyatnya* dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qisas* dan *diyat* adalah aturan yang baik memberi kemaslahatan. Karena pembunuh itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak jama'ah, maka *ta'zir* itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuhan dimana

²⁴ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 8-9

sanksi *qisas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.²⁵

b) Hukuman *kawalah* (penjara kurungan)

Ada dua macam hukuman *kawalah* dalam syari'at Islam, yaitu:

(1) Hukuman *kawalah* terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjual *khamr*, pemakan riba, dan lain sebagainya. Adapun batas terendah dari hukuman penjara sebagai *ta'zir* juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman *had* dengan hukuman *ta'zir*.

(2) Hukuman *kawalah* tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

c) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan), dan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak

²⁵ Ahmad Wardhi Muslich, *op.cit.*, hlm. 177.

boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarimah* zina yang merupakan hukuman *had*. Apabila pengasingan dalam *ta'zir* lebih dari satu tahun, ini berarti bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dari Nu'man ibn Basyir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “*Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampaui batas.*”²⁶

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

d) Hukuman salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hirabah*), dan untuk *jarimah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman *had*. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum. Tidak dilarang untuk mengerjakan wudhu, tetapi dalam mengerjakan shalat cukup

²⁶ M. Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 40.

dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban, maka menurut fuqaha tidak lebih dari 3 hari.

Di antara sumber hukuman *ta'zir* salib adalah bahwa Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman *ta'ziri* salib yang dilakukan di suatu pegunungan Abunab.

Hukuman salib menurut cara tersebut ialah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran tidak ubah layaknya pada masa sekarang, seperti hukuman yang dijatuhkan atas murid sekolah ketika mereka disuruh bertekuk lutut lama atau sebentar.

Kalau diingat bahwa hukuman salib adalah hukuman *ta'zir* yang lebih wajib dijalankan, lain halnya dengan hukuman *hudud* atau *qishas*, maka hukuman tersebut diserahkan kepada eksekutif untuk dijalankan atau tidak.²⁷

e) Hukuman pengucilan (*al-hajru*)

Di antara hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam ialah pengucilan sebagai hukuman terhadap istri yang dinyatakan dalam firman Allah:

... فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ... (:)

Artinya: "...Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka..." (QS. an-Nisa': 34)²⁸

²⁷ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 315.

²⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 123.

Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Ba'iah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.²⁹

f) Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tandih*) dan peringatan

Ancaman yang merupakan hukuman salah satu dari hukuman ta'zir dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain ancaman akan dijilid atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hukuman menjatuhkan keputusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Teguran yang merupakan hukuman *ta'zir* kalau pembuat yang dijatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat kalau hukuman ini cukup memberi hasil.

g) Hukuman denda (*al-gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan dalam syari'at Islam atau Islam mengenal pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang didenda dengan lipat dua kali harganya buah

²⁹ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 318.

tersebut disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri.³⁰

Dengan demikian sanksi denda sesuai dengan surat al-Qur'an, Allah berfirman, QS. Al-Baqarah: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(179 :)

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)³¹

Adapun ketentuan pidana *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hukumlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.³²

b. *Jarimah-jarimah* sengaja dan/tidak sengaja (*dolus* dan *colpus*)

Pada *jarimah* sengaja (*jara'in maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan. Sedang ia tahu perbuatan itu dilarang (salah). Sedangkan *jarimah* tidak sengaja (*jara'un ghairu maqsudah*) si pembuat tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruan.³³

³⁰ *Ibid.*, hlm. 316.

³¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 44.

³² Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 340.

³³ *Ibid.*, hlm. 213.

Contohnya seorang pemburu yang ingin menembak binatang buruan, tetapi mengenai orang.

c. *Jarimah* positif dan negatif

Jarimah positif (*jarimah ijabiyah*) terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang seperti mencuri, zina, memukul dan sebagainya, disebut *delico commisionis*. *Jarimah* negatif (*jarimah salabiyah*) terjadi karena tidak mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat.³⁴

d. *Jarimah-jarimah* masyarakat dan perseorangan

Jarimah perseorangan yaitu dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat. Pada *jarimah hudud* termasuk *jarimah* masyarakat, *jarimah qishah diyat* termasuk *jarimah* perseorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan si pembuat bisa dijatuhi hukuman *ta'zir* dengan maksud untuk memelihara hak masyarakat yang telah dirugikan. Sedangkan pada *jarimah ta'zir*, ada yang menyinggung hak masyarakat dan hak perseorangan tentu berisi pula hak Tuhan sebab di antara hak Tuhan atas tiap-tiap orang *mukalaf* ialah agar ia tidak mengganggu orang lain.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

e. *Jarimah-jarimah* biasa dan politik

Setiap *jarimah* yang pembuat untuk tujuan-tujuan politik disebut *jarimah* politik (*jarimah* pemberontakan), sedangkan *jarimah* biasa tidak mempunyai tujuan politik (*jarimah* ‘*adiyah*’) dan sebenarnya corak kedua macam *jarimah* ini tidak berbeda, baik macam maupun cara memperbuatnya. Perbedaan kedua terletak pada motif (faktor pembangkitnya).³⁶

4. Unsur-Unsur *Jarimah*

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengertian *jarimah* adalah:

Artinya: ”*Segala larangan-larangan yang haram dilarang oleh Allah dan diancam oleh Allah dan diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Maksud al-mahdurat adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.*”³⁷

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa larangan-larangan tersebut datangnya dari Allah (syara’), maka larangan-larangan itu ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*), sebab pembebanan itu artinya panggilan (*khitab*), dan orang yang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati, tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁷ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 67.

³⁸ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 5.

Bahkan orang yang dapat memahami pokok panggilan, tetapi tidak mengetahui pokok-pokok perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, seperti orang dan anak-anak belum *tamzis*, maka keduanya dipersamakan dengan hewan dan benda-benda mati.

Dari uraian di atas ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi :

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur formil" (*rukun Syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur materiel" (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (*rukun adabi*).³⁹

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada "*jarimah*". Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi *jarimah* pencurian.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, maka

³⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*.

Di kalangan fuqaha biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya *jarimah*.⁴⁰

B. Hukum Pidana Positif tentang Pengedaran Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Pengertian pemalsuan uang ditinjau dari asal kata, terdiri dari pemalsuan dan uang, pemalsuan itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang membuat sesuatu menjadi tidak tulen. Pemalsuan dalam arti kata bahasa menurut S. Wojowasisto berasal dari kata "palsu" yang berarti "lancung", tidak sah, memalsukan, melancungkan, kata palsu sebagai kata sifat dalam arti memalsukan disini dapat berarti sebagai orang yang memalsu suatu benda. Sebelum sampai pada uraian mengenai pemalsuan khususnya pemalsuan uang, maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian meniru dan memalsu seperti yang dimaksud dalam KUHP.

Pengertian meniru dan memalsu mata uang adalah :

- Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang biasanya memakai logam yang lebih murah harganya akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan meniru.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

- Memalsu uang adalah uang tulen dikurangi bahannya kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, sedemikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang benar.⁴¹

Terhadap pengertian yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, hal mana disamping mengedarkan, pengedaran sendiri melakukan perbuatan meniru atau membuat uang palsu. Membikin secara meniru adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana yang palsu, karena satu-satunya syarat untuk pembuatan ini, ialah: bahwa hasil pembikinan ini adalah suatu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau kertas yang tulen sedemikian rupa, bahwa banyak orang mengirakannya sebagai uang tulen, tidaklah diperlukan, apakah misalnya logam yang terpakai untuk membikin uang palsu itu sebetulnya lebih harganya dari logam yang terpakai untuk membikin uang tulen. Juga tetap ada uang palsu apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membikin uang palsu ini, yang merupakan uang tulen ialah uang yang dibikin atas perintah pemerintah sendiri. Dinamakan memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain mungkin dengan demikian uang kertas tulen tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih.⁴²

⁴¹ S. Wojowasisto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Sinta Dharma, 1972, hlm. 284.

⁴² Wirjono Djodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 175.

Perbuatan mengedarkan merupakan perbuatan penggunaan uang palsu di dalam pengedaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran.⁴³

Selanjutnya perbuatan mempergunakan kembali uang palsu setelah menerimanya saat penerimaan mana diketahui akan kepalsuannya, termasuk juga dalam pengertian mengedarkan. Perbuatan mengedarkan dapat ditafsirkan sebagai menggunakan dalam lalu lintas pembayaran. Uang itu adalah alat pembayaran, maka uang itu berpindah tangan ke orang lain dari pembuatnya atau pelakunya.

Dalam hal perbuatan menyuruh mengedarkan, pelaku mempergunakan orang lain sebagai pengedar uang, bukan diedarkan sendiri. Dengan demikian maka perbuatan mengedarkan uang palsu adalah termasuk tindak pidana, yang dimaksud disini mengedarkan uang palsu untuk mengelabui orang. Hal ini diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu atau kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan tidak dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke negara Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang aslinya yang tidak dipalsukan, dihukum penjara selamalamanya 15 tahun.”

⁴³ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 167.

Perbuatan ini juga termasuk suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan merugikan negara, karena uang adalah sebagai salah satu faktor terpenting dalam bidang perekonomian.

Dengan adanya kerugian baik dari pihak korban, masyarakat dan negara akibat dari pemalsuan uang, maka dengan demikian kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Paul Moediko Moeliono yang mengatakan: “Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak bisa dihilangkan sama sekali.”⁴⁴

Mengenal pengertian uang Winardi mengemukakan sebagai berikut: “Uang ialah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat tukar untuk barang-barang lain pada daerah tertentu, hingga dengan demikian uang juga digunakan sebagai alat pengukur nilai atau menghimpun kekayaan.”

Jadi perbedaan antara *Meniru* dan *Memalsu* uang diamati terletak pada membuat barang yang menyerupai uang untuk meniru, sedang untuk memalsu terletak pada uang tulen yang dikurangi bahannya. Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan memberikan sifat asli, dan perbuatan

⁴⁴ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Cet. II, Bandung: 1987, hlm. 31.

memalsukan terdiri atas penggantian bahan-bahan yang lebih rendah nilainya.⁴⁵

Membikin secara meniru (namakan) ini adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana uang palsu. Syarat-syarat untuk perbuatan ini ialah bahwa hasil pembikinan ini adalah suatu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau uang kertas yang tulen. Dan memalsukan uang adalah perbuatan kedua yang merupakan tindak pidana pemalsuan uang, asal dipenuhi saja unsur tujuan si pelaku untuk mengedarkan uang palsu itu sebagai uang tulen yang tidak diubah dan ini juga mencuri peralatan pembuat uang.⁴⁶

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah suatu aturan hukum di suatu negara atau masyarakat yang menentukan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenai suatu nestapa (penderitaan) atau akibat lain yang tidak menyenangkan oleh badan penguasa atau negara yang berwenang.⁴⁷

Tindak pidana adalah merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana yang dalam bahasa Belandanya disebut "*Strafbaarfeit*".

Banyak di kalangan sarjana hukum memberikan definisi dari tindak pidana ini, antara lain Prof. Moelyatno, SH. Beliau mengatakan bahwa tindak pidana ini sebagai perbuatan pidana yang menurutnya adalah

⁴⁵ Moch Anwar, *op.cit.*, hlm. 156.

⁴⁶ Wirjono Djodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 176.

⁴⁷ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.1.

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁸

Selain itu, P.A.F. Lamintang juga mengatakan bahwa kenyataan dalam hal ini mengandung pengertian bahwa suatu dan sifatnya melawan hukum, maka dapat diancam pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁴⁹

2. Ciri-ciri Pengedaran Uang Palsu

Apabila masyarakat menemukan kasus peredaran uang palsu, dapat melaporkan uang palsu tersebut kepada Bank Indonesia, Bank umum atau pihak kepolisian. Sedangkan ciri-ciri umum pada uang kertas rupiah adalah bahan uang kertas adalah kertas/plastik dengan spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

- Tanda air adalah pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya
- Benang pengaman adalah ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultra violet dengan satu warna atau beberapa warna
- Cetak *intagko* adalah cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

- *Rectoverso* adalah pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.
- *Optical variable ink* adalah hasil cetakan mengkilap (*gutteing*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Tulisan mikro adalah tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- *Invisible ink* adalah hasil cetak tidak kasat mata yang akan memedar di bawah sinar ultra violet.
- *Multi layer latent image/metal layer* adalah teknik cetak dimana dalam satu bidang cetakan terlihat lebih dari satu obyek gambar bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- *Window/clear window* adalah pada kertas uang terdapat bagian yang terbuat dari plastik transparan berwarna/tidak berwarna.⁵⁰

Ciri-ciri Uang Palsu Kertas Beberapa Lembaran Pecahan Rp. 100.000 dan Rp. 50.000

Ciri-ciri uang kertas pecahan Rp. 100.000 tahun emisi 1999 sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 peraturan BI No. 1/8/PBI/99 tentang pengaturan dan pengedaran uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 1999 adalah:

⁵⁰ http://www.karawangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=vie

a. Gambar bagian muka

- 1) Gambar utama berupa gambar 2 orang pahlawan proklamator dan dibawahnya dicantumkan tulisan “Dr. Ir. Soekarno & Dr. H. Moehammad Hatta”.
- 2) Di antara gambar 2 orang pahlawan proklamator terdapat tulisan-tulisan teks proklamasi RI dengan latar belakang ragam bias menyerupai bunga
- 3) Di sebelah atas gambar utama terdiri tulisan BI dengan garis bawah berupa tulisan mikro 100.000,- berulang-ulang tanpa spasi dan dibawah gambar utama terdapat tulisan 100.000,-
- 4) Dalam arah horizontal di pojok kiri atas dan dalam arah vertikal di pinggir kanan terdapat angka nominal 100.000,-
- 5) Latent image berupa logo BI dalam bentuk oval terdapat di pokok kiri bawah atau di pundak kanan gambar Dr. Ir. Soekarno, dan di pojok kanan atas terdapat gambar lambang garuda Pancasila yang dicetak di atas bidang lingkaran emas metalik.
- 6) Di sebelah gambar utama terdapat anti reproduksi berupa angka 100.000,- yang terbuat dari garis-garis vertikal dan miring 1 angka tahun emisi “1999” tulisan gubernur tanda tangan gubernur BI (Syahril Sabirin) beserta tulisan gubernur dan tanda tangan deputi gubernur BI (Iwan R. Prawi Ranata) beserta tulisan Deputi Gubernur.

- 7) Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis horizontal, bergelombang, miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk hiasan menyerupai bunga.

b. Gambar bagian belakang

- 1) Gambar utama berupa gambar gedung MPR dan DPR RI
- 2) Di sebelah atas gambar utama terdapat tulisan BI dengan garis bawah berupa tulisan mikro "100.000,-" berulang-ulang tanpa spasi, di bawah no seri sebelah sebelah kanan atas terdapat angka "100.000,-" dalam bidang segi empat yang akan terlihat berwarna hijau kekuning –kuningan dan di bawah sinar ultra violet, dan logo BI dengan latar belakang garis-garis melengkung berbentuk setengah lingkaran.
- 3) Di sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "Demi Rahmat Tuhan Yang maha Esa, BI mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 100.000,-".
- 4) Dalam arah horizontal di pojok kanan atas dan dalam arah vertikal di pinggir kiri atas terdapat angka nominal "100.000,-".
- 5) Nomor seri berwarna hitam yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka terletak di pojok kiri bawah dan sebelah kanan atas tepat di bawah angka nominal "100.000,-"

c. Warna⁵¹

Bagian muka dan bagian belakang dicetak dengan warna kuning, orange, hijau, merah, biru dan coklat.

d. Bahan

- 1) Jenis bahan polymer substrate (plastik) digunakan 151 mm/65 mm
- 2) Bahan polymer substate (plastik) memiliki:
 - a) Shadow image berupa gambar lambang negara Garuda Pancasila
 - b) Bagian panganan terpotong oleh shadow image dengan bentuk melengkung yang memuat tulisan BI 100.000,- berselang-seling terbalik yang dapat dibaca dari bagian muka dan bagian belakang.
 - c) Bidang lingkaran warna emas metalik terletak di pojok kanan atas.
 - d) Plastik transparan berwarna merah (*color window*) menyerupai bunga yang di dalamnya terdapat emboss logi BI yang terasa kasar di raba, di bawahnya terdapat 2 buah plastik transparan (*clear window*) menyerupai daun yang di dalamnya masing-masing terdapat gambar padi dan kapas.⁵²

Ciri-ciri uang beberapa lembar kertas pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 1999 sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal 2 Peraturan BI

⁵¹ Materi pelatihan penataran mengenal ciri-ciri keaslian uang rupiah, Bank Indonesia oleh Sdri Indah Sri Wulandari, SE. pada tanggal 31 Desember 2008.

⁵² *Ibid.*

No. 1/2/PBI/1999 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas baru pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 1999 adalah:

a. Bagian muka

- 1) Gambar utama berupa gambar pahlawan nasional W.R. Supratman, pada sebelah kanan terdapat cetakan latent image dengan tulisan BI dan kanan bawah yang terdapat tulisan Wage Deballof Soepratman pencipta lagu Indonesia Raya.
- 2) Angka 50.000,- dalam posisi horizontal di sisi kiri atas dan dalam posisi vertikal gambar bunga yang membentuk restoverso, angka "1999" tulisan dewan "Gubernur" tanda tangan Deputy Gubernur tulisan mikro teks logo Indonesia Raya dalam bingkai segi empat, tulisan "BI" dan dibuat yang terdapat tulisan "lima puluh ribu rupiah" berada di sebelah kiri gambar utama.
- 3) Gambar metal langer memuat logo "BI" dan gambar niola di bawah terdapat tulisan mikro "BI" berulang-ulang tanpa spasi yang utuh atau terpotong di sisi kanan atas terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dan di sisi kanan bawah terdapat gambar logo "BI" yang dicetak dengan tinta optical variable link (OVI).
- 4) Tulisan-tulisan perum percetakan vary RI IMP 1999 terdapat di sisi kanan bawah angka tahun yang akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang.

b. Bagian Belakang

- 1) Gambar utama berupa kegiatan pengibaran bendera sang saka merah putih dengan 4 orang pengibar bendera merah putih beserta dengan 2 orang pengawal, pada bagian bendera yang berwarna merah terdapat mikro teks *Gauss Effect*, dan di samping kanannya terdapat tulisan BI serta gambar bunga yang membentuk *rectoverso*.
- 2) Disamping kiri tulisan pengibaran bendera terdapat gambar globe yang memuat kepulauan Indonesia yang dibentuk dari tulisan BI berulang-ulang tanpa spasi yang utuh atau terpotong sebagai dengan text *Gauss Effect*, dan disamping kananya terdapat tulisan BI serta gambar bunga yang membentuk *rectoverso*.
- 3) Angka "50.000" dalam posisi horizontal terdapat di sisi kanan bawah dan dalam posisi vertikal terdapat di sisi kiri atas dengan ukuran yang lebih kecil.
- 4) Gambar utama terdapat tulisan-tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, BI mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai "50.000,-"
- 5) Nomor seri terdapat dari 3 huruf dan enam angka terdapat disisi kiri bawah dengan warna hitam dan sisi kanan atas dengan warna merah.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Hakim BW. Charles Ndaumanu, SH., M.H. pada tanggal 15 Desember 2008.

c. Warna

- 1) Bagian muka di cetak dengan warna ungu, hijau muda, kuning, ungu kebiru-biruan, biru, abu-abu, petak, hijau tua dan cokelat serta warna tinta Ovi dari kuning emas berubah menjadi hijau.
- 2) Bagian belakang di cetak dengan warna ungu, hijau, kuning, ungu kebiru-biruan, hitam, merah, ungu kemarahan dan hijau tua.

d. Ukuran kertas

- 1) Ukuran kertas 152 x 72 mm
- 2) Dalam keadaan baru kertas bersuara nyaring bila dikibas-kibaskan
- 3) Memiliki tanda air berbayang (*shadow water mark*) berupa gambar pahlawan nasional HOS Cokroaminoto dan tanah air elektrotip water mark berbentuk logi BI di tengah ragam hias, seluruhnya berada di sisi kanan BI dilihat dari berbagai muka.
- 4) Memiliki bagian pengaman plastik tembus pandang yang memuat tulisan mikro BI berwarna hitam yang utuh atau terpotong sebagian dan dapat dibaca dari bagian muka maupun bagian-bagian penggunaan tersebut memancar dibawah sinar ultra violet.

e. Titik perbedaan pecahan 100.000-, adalah :

- 1) Tulisan makro 100.000-, ulang tanpa spasi yang merupakan garis bawah yang berada dibawah tulisan BI baik dibagian muka maupun belakang tidak jelas
- 2) *Intaglio* tidak terasa dengan baik

- 3) Latent image berupa logo BI dalam bentuk oval yang terdapat di pojok kiri bawah atau di pundak kanan gambar terdapat tulisan di pokok kiri bawah atau di pundak kanan gambar Dr. Ir. Soekarno tidak dapat dibaca dengan jelas.
 - 4) Teks proklamasi RI tidak dapat dibaca dengan jelas
 - 5) Angka 100.000 dalam bidang segi empat di bawah nomor seri sebelah kanan atas, hanya terlihat berwarna kekuning-kuningan di bawah sinar ultra violet dan tidak terlihat warna hijau
 - 6) *Clear window* berwarna kemerah-merahan dan buram, seharusnya berwarna merah yang jelas
 - 7) Emboss logo BI yang berada dalam plastik transparan dan berwarna merah (*color window*) menyerupai bunga, tidak berbentuk logo dan tidak terasa kasar bila diraba.⁵⁴
- f. Perbedaan untuk pecahan Rp. 50.000 adalah:
- 1) Tulisan mikro tidak jelas
 - 2) Intaglio tidak jelas
 - 3) Tanda air terbayang H.O.S. Cokrominoto tidak timbul apabila digesek di atas kertas putih tipis dengan menggunakan pensil
 - 4) Nomor seri kanan atas pada lampu ultra violet warna kemerah-merahan, yang asli berwarna kekuning-kuningan, warna nomor diberi yang berada di kiri bawah tetap atau tidak berubah warna yang aslinya memendar kehijau-hijauan.

⁵⁴ *Ibid.*

- 5) Tidak mempunyai barang penggunaan (foto copy)
- 6) *Rectoverso* tidak saling mengisi antara bagian muka dan bagian belakang.⁵⁵

Ciri-ciri uang logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Gambar lambang negara Garuda Pancasila
- b. Kata "Republik Indonesia"
- c. Sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
- d. Tanda tahun emisi.⁵⁶

Beberapa karakteristik tertentu yang perlu diperhatikan dalam uang logam rupiah antara lain;

- a. Setiap pecahan uang logam mudah dikenali baik secara kasar dan kasat raba.
- b. Uang logam menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mengandung zat yang membahayakan.
- c. Uang logam yang dikeluarkan dalam ukuran yang sesuai, tidak terlalu besar atau tidak terlalu berat
- d. Uang logam Rupiah berbentuk bulat, dengan bagian samping bergerigi atau tidak bergerigi.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 dan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2007 tentang Bank Indonesia, Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 1992, hlm. 27.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

Mata uang dapat dibedakan ke dalam:

- a. Mata uang standar antara lain adalah:
 - 1) Mata uang dibuat dari logam standar
 - 2) Dapat dibuat dengan leluasa atau bebas oleh setiap orang
 - 3) Mata uang itu menjadi alat pembayaran yang sah sehingga jumlah yang tidak terbatas
- b. Mata uang tanda antara lain adalah:
 - 1) Mata uang tanda itu tidak terbuat dari logam standar
 - 2) Mata uang tanda tidak dapat dibuat dengan leluasa atau dengan bebas
 - 3) Mata uang tanda itu menjadi tanda pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan pemalsuan uang rupiah dan uang logam adalah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomi, juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap kejahatan pemalsuan uang rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.⁵⁹

27. ⁵⁸ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.

⁵⁹ Materi Pelatihan Penataran, *op.cit.*, tanggal 31 Desember 2008.

3. Dasar dan Alasan Hukum Pidana Pengedaran Uang Palsu

Dalam rangkaian pembahasan mengenai pengertian pemalsuan uang di atas, maka penulis akan menguraikan perihal pemalsuan uang menurut pasal 244 KUHP, bunyi pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut:

”Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun penjara.”⁶⁰

Pengertian tentang bunyi pasal 244 KUHP di atas menurut K. Sugandhi, adalah sebagai berikut: Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

- Meniru berarti membuat sedemikian rupa sehingga menyerupai yang asli
- Mata uang negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari logam
- Mata uang negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari kertas
- Mata uang bank, ialah alat pembayaran sah yang dibuat oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah terbuat dari kertas
- Dalam pemalsuan alat pembayaran ini, tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing.⁶¹

⁶⁰ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Cet. Ke-20, 1999, hlm. 89.

⁶¹ Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 259.

Menurut Moch. Anwar dikatakan bahwa pemalsuan uang dalam ruang lingkup yang luas meliputi perbuatan jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
- b. Ketertiban msy yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum.⁶²

Dalam pengertian yang kedua ini yang disebut sebagai tindak pidana pemalsuan dalam pengertian yang khusus dimana dalam segi praktisnya merupakan pemalsuan yang dalam bentuknya bermacam-macam yaitu berupa:

- a. Keterangan palsu
- b. Pemalsuan surat
- c. Pemalsuan merk
- d. Pemalsuan uang dan sebagainya

Adapun pemalsuan itu sendiri tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang berbuat sedemikain rupa, yang merupakan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang-barang mana seakan-akan asli atau benar. Sedangkan keasliannya atau kebenaran itu tidak dimilikinya dan oleh karena gambaran tersebut orang atau pihak lain mj terperdaya.⁶³

⁶² H.A.K. Moch Anwar, *op.cit.*, hlm. 155.

⁶³ Soedjono D., *op.cit.*, hlm. 31.

Uang adalah sebagai alat tukar yang sah. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sebagai alat tukar menukar yang sah dan terdiri atas semua jenis mata uang (uang logam, uang kertas negara atau uang kertas bank) baik yang dibuat bank pemerintah/negara maupun bank, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi berdasarkan undang-undang.
- b. Sebagai alat tukar menukar yang sah dan dikeluarkan atau dibuat oleh negara/pemerintah negara asing berdasarkan undang-undang dari negara asing itu (Dolar, Yan, Golden dan sebagainya).⁶⁴

Selanjutnya perihal pemalsuan dengan jalan mengurangi bahannya kemudian di tempel dengan bahan yang lebih murah sedemikian rupa sehingga uang itu seakan serupa dengan yang asli. Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan yang lainnya yang memberi sifat asli.⁶⁵

Perbuatan memalsukan uang terdiri atas penggantian bahan-bahan baku untuk membuat yang asli dengan bahan-bahan yang lebih rendah nilainya atau dapat juga merupakan suatu perbuatan mengubah tanda stempel yang mengakibatkan tulisan dalam uang itu menunjukkan nilai lain dari pada yang sebenarnya, perubahan mana disertai pula dengan memberi warna, melapisi mata uang perak dengan emas supaya terlihat seperti mata uang emas dan sebagainya. Dengan demikian pada pokoknya

618. ⁶⁴ Sumadji P. Yudha Pratama, Rosita, *Kamus Ekonomi*, Wacana Intelektual, 2006, hlm.

⁶⁵ Adam Chazawi, *op.cit.*, hlm. 25.

perbuatan atau pemalsuan uang itu adalah suatu perbuatan untuk mengubah nilai yang asli.⁶⁶

Perihal tindak pidana terhadap uang ini diatur di dalam KUHP yaitu pasal 244 KUHP sampai dengan pasal 252 KUHP dan pasal 519 KUHP, yaitu:

1. Tindak pidana dengan cara meniru atau memalsukan maka uang, uang kertas negara atau uang kertas bank, diatur dalam pasal 244 KUHP
2. Tindak pidana dengan cara mengedarkan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu diatur dalam pasal 245 KUHP.
3. Tindak pidana dengan cara mengurangi nilai mata uang atau merusak mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank, diatur dalam pasal 246 KUHP.
4. Tindak pidana dengan cara mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, diatur dalam pasal 247 KUHP.
5. Tindak pidana dengan cara mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu yang tidak termasuk ketentuan pada 2, 4 diatur dalam pasal 249

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

6. Tindak pidana dengan cara membuta atau mempunyai alat untuk meniru, memalsukan atau mengurangi nilai uang diatur dalam pasal 250 KUHP.
7. Tindak pidana dengan cara menyimpan atau memasukkan ke ind keping-keping atau lembaran perak (logam) yang dirubah untuk dijadikan mata uang palsu, diatur dalam pasal 251 dan 252 KUHP.
8. Tindak pidana dengan cara membuat, menjual dan sebagainya yang menyerupai mata uang atau kertas, diatur dalam pasal 519 KUHP.

Terhadap pengertian yang "ditiru" atau "dipalsukan" sendiri, hal mana disamping mengedarkan, mengedar sendiri melakukan perbuatan meniru atau membuat uang palsu.⁶⁷

Kalimat yang pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan dalam hal ini orang yang mengedarkan itu tidak membuat tetapi menerima dari orang lain dan orang lain tersebut juga menerima dari orang lain. Pengertian "menyimpan" disini yaitu sebagai perbuatan menyimpan atau dapat berarti mempunyai persediaan uang palsu, atau uang itu dalam kekuasaannya. Memasukkan ke daerah Republik Indonesia dari negara asing atau berupa perbuatan mengimport.⁶⁸

Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan dengan maksud disini berarti si pelaku mempunyai maksud atau niat, baik dengan jalan mengedarkan sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya. Jadi pengertian disini bukan berarti si pelaku telah

⁶⁷ Sugandhi, *op.cit.*, hlm. 261-262.

⁶⁸ Adam Chazawi, *op.cit.*, hlm. 139.

melakukan perbuatan itu sendiri melainkan menyuruh. Sebagai yang asli atau tidak dipalsukan berarti palsu itu seakan-akan asli, tulen dan tidak dipalsukan. Sedangkan uang palsu itu diperoleh dengan jalan:

- a. Ditiru atau dibuat sesuatu yang mirip dengan yang asli
- b. Dipalsu atau diganti bahan-bahan bakunya dengan yang lebih rendah nilai bobotnya, atau dengan cara mengubah tanda stempelnya nilai nominalnya atau warnanya.
- c. Diperoleh dari orang lain, baik pembuatnya atau pemalsuannya sendiri, ataupun dari pengedar yang lain.
- d. Menyimpan atau mempunyai persediaan
- e. Memasukkan atau mengimport dari negara lain

Jadi dengan berdasarkan beberapa pengertian dan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ketentuan pidana terhadap pemalsuan uang sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 244 KUHP.⁶⁹

Perumusan delik yang mencatumkan syarat dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan dapat melemahkan penuntutan dalam hal uang palsu dimaksud belum diedarkan, sedangkan unsur mengedarkan seyogyanya adalah merupakan unsur yang memberatkan.⁷⁰

Berkaitan dengan hal itu, maka perbuatan mengedarkan uang palsu seharusnya adalah delik seligus diri sendiri (terpisah dari pemalsuan uang), sehingga apabila pelaku pemalsuan uang juga mengedarkan uang

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 140

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bkati, 1991, hlm. 39.

palsu tersebut maka hukumannya harus lebih berat.⁷¹ Oleh karena itu hukuman diedarkannya uang palsu dimaksud hendaknya tidak dijadikan alasan yang memberatkan karena sebelum memutuskan hukuman pihak yang terkait mempunyai barang bukti. Saksi yang dijukan si terdakwa dalam pengadilan apalagi sebelumnya si terdakwa pernah melakukan kejahatan yang serupa atau yang disebut dengan hukuman penjara residivis dan seharusnya hukumannya lebih memberatkan dari pada hukuman sebelumnya, agar si terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam mengedarkan uang palsu lebih jera dan agar tidak melakukan hal yang serupa karena itu semata-mata merugikan dirinya sendiri.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 11.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR

1072/PID/B/2004/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA

PENGEDARAN UANG PALSU

A. Sekilas Pandangan Pengadilan Negeri Kota Semarang

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kota Semarang

Sejarah berdirinya pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:¹

Sebelum perang dunia ke II di Semarang terdapat *rood Va justitie* yang artinya sama dengan pengadilan tinggi sekarang, yang mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam, disamping itu terdapat pula *langerecht* dan *landgread*.

Landgerecht mengadili perkara-perkara *novies*, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran peraturan Daerah (perda). Sedangkan *landgerecht* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *landgerecht* dan *langgread* kemudian menjadi pengadilan negeri yang berkedudukan di jalan raden patah Semarang.

Sebagai pimpinan pengadilan Negeri Semarang adalah, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah 1950 adalah sebagai berikut:

¹ Dokumentasi situasi, Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah, (Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, RI. Direktorat Jendral Badan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, 2001, hlm. 48-49.

1. Bapak Soerjadi, SH
2. Bapak Soebiono Tjirowinoto, SH
3. Bapak Woejanto, SH
4. Bapak Poewawoto gandasoebrato, SH
5. Bapak Soekanto Poerwosaputro, SH
6. Bapak Soekotjo, SH
7. Bapak Soemadi Aloe, SH
8. Bapak Hasan Ghasim Shahab, SH
9. Bapak R. Padmo Soerasmo, SH
10. Bapak Soegijo Soemardjo, SH
11. Bapak Ohim Padmadisastra, SH
12. Bapak R. Saragih, SH
13. Bapak S.M. Binti, SH
14. Bapak Monang Siringo Ringgo, SH
15. Bapak Soeharso, SH
16. Bapak R. Soenarto, SH
17. Bapak Suparno, SH
18. Bapak Subardi, SH
19. Bapak Mohammad Saleh, SH
20. Bapak HR. Soekandar, SH
21. Bapak Abid Soleh Mendrofa, SH

Mulai bulan Desember 1998 pimpinan pengadilan Negeri Semarang adalah Bapak Subardi, SH.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung pengadilan Negeri Semarang yang terletak di jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung baru yang terletak di jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang. Gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah ada arsipnya di pindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah di adakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI. Sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.

Adapun perangkat organisasi di Pengadilan Negeri/Niaga Semarang kelas 1 adalah sebagai berikut:

Ketua : Amriyat, SH

Wakil Ketua : Robert Simorangkir, SH., MH.

Hakim :

1. Suapto, SH
2. Yohanes De Brito Gun Gundid, SH
3. Setyabudi Tejo Cahyono, SH, M.Hum
4. TH. Tampubolan, SH

5. Yunianto, SH
6. Agustinus Silalahi, SH
7. BW. Charles Naumanu, SH
8. Drs. Amin Sembiring, SH
9. Sarwedi, SH
10. Kurnia Yani, Darmono, SH., H.Hum.
11. Fatchurrohman, SH
12. B. Sitanggang, SH
13. Sujudtmiko, SH
14. Lidya Sasando Parapat, SH
15. Ronius, SH
16. Akhmad Rosidin, M.H
17. Sindu Sutrisno, SH., M.Hum.

Kepaniteraan

Panitera/Sekretaris	: Wuryanto, SH
Wakil Panitera	: Mulyono, SH
Wakil Sekretaris	: Maksudi, SH
Panitera Muda Pidana	: Muhiyar, SH
Panitera Muda Hukum	: Ali Nur Yahya, SH., MH.
Panitera Muda Umum	: Sri Sunarti, SH
Kepala Bagian Umum	: Sutedjo, SM., HK
Kepala Bagian Keuangan	: Santoso, SH
Kepala Bagian Personalia	: Rudi Suprpto, SH

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kota Semarang

Pada prinsipnya pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali Undang-undang menentukan lain (UU No, 14 tahun 1970) kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang harus di emban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam pasal No. 14 tahun 1970 pasal 2,3, dan UU No. 2 tahun 1986, yaitu:

1. Pasal 2 UU No. 2 tahun 1986 10 Undang-undang No. 8 tahun 2004
 “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
2. Pasal 3 ayat 1 UU No, 2 tahun 1986 10 undang-undang No. 8 Tahun 2004 “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.

3. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Hukum acara pidana adalah aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asar yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah:

1. Perlakukan yang sama atas diri seseorang dihadapan hukum, asas ini sering disebut dengan *equality before the law*.
2. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*).
3. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam undang-undang (*principle of legality*).
4. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun di adili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
5. Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak, asas ini dikenal sebagai *Gontate justice/ speedy trial/ fair trial*.
6. Setiap orang wajib diberi kesempatan memperoleh hukum

7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib di beri dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmideujkheld van hot onderzoek*)
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*Open boarhound van hot process*).
10. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.

B. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/PID/B/2004/ PN.SMG tentang Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu yang Berkaitan dengan KUHP Pasal 245

PUTUSAN

NO. 1072/PID/B/2004/ PN.SMG

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Suripan Bin Wadiran
 Tempat Lahir : Kudus
 Tanggal Lahir/umur : 2 Februari 1957/47 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jetak Kedungdowo RT. 01 RW. 05
 Kaliwungu Kudus
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta/buruh

Terdakwa berada dalam/tahanan sejak tanggal 24 Juli 2004

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berita acara pemeriksaan yang bersangkutan

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 30-09-2004.²

Mengenai data kasus pengedaran uang palsu di wilayah Pengadilan Negeri Semarang, penulis akan terlebih dahulu mencoba menganalisa kasus pengedaran uang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang di tinjau dari segi para pelakunya maupun sifat dari perbuatannya itu sendiri dan yang tidak para pelakunya tersebut.

Adapun kenyataannya memalsu dan meniru yang dilakukan oleh para terdakwa ialah dengan cara memindahkan gambar dari uang kertas asli yang bernilai Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- ke dalam kertas yang telah disediakan

² Putusan Pengadilan Negeri Semarang

untuk itu dengan menggunakan setrika listrik dan bahan warna berupa cairan yang dibeli dari apotik. Dan barang bukti tersebut segera dirampas dan dimusnahkan agar tidak ditiru masyarakat.

Namun demikian apapun yang menjadi motif para terdakwa dalam tindak pidana pengedaran uang palsu itu sangat membahayakan, karena apabila uang yang dipalsukan tersebut sempat beredar maka dampaknya akan mengacaukan ataupun melumpuhkan perekonomian negara.

Bahwa sesuai hasil penelitian di wilayah hukum Kabupaten Boyolali khususnya pada instansi kepolisian, kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dalam tahun 2004 telah terjadi kasus tindak pidana pengedaran uang palsu dengan putusan No.1072/PIDB/2004/PN.SMG, dan terdakwa saudara Suripan bin Wadiran telah terbukti melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu serta diberi sanksi ancaman penjara 8 tahun potong tahanan menjadi 5 tahun penjara sesuai unsur-unsur pasal 245 KUHP.³ Dan ternyata beberapa kasus tersebut antara satu dengan terdakwa yang lain saling terkait karena adanya kerja sama diantara si terdakwa dengan kelompok lainnya.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/PID/B/2004/PN.SMG

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut (lihat surat dakwaan) yang intinya tidak ditulis dalam putusan ini, namun dianggap sudah termuat didalamnya.

³ Mulyatno, *KUHP*, Jakarta: Rineka, Cet. 20, 1999, hal. 89-90

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengajukan bukti-bukti berupa: 191 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 lembar yang palsu pecahan Rp. 50.000,-

Bahwa terdakwa kasus pengedaran uang palsu tersebut oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya pada dasarnya menunjuk pada ketentuan pasal 244 dan 245 KHUP. Dimana dalam hal ini akan penulis lampirkan dasar putusan pertimbangan hakim dari Pengadilan Negeri Semarang.

Alasan-alasan penjatuhan pidana pada umumnya, para terdakwa pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di kota Semarang dijatuhi hukuman karena semua unsur-unsur yang ada dalam pertanggung jawaban pidana telah terpenuhi, dan bahwa pemindanaan tersebut tidak dapat dihindarkan karena kehidupan masyarakat menghendakinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh.⁴ Mengatakan bahwa ” pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemindanaan tersebut memang merupakan pertahanan terakhir. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum dan tata kehidupan bernegara, akibat dari perbuatannya diancam dengan pidana.

Bahwa perbuatan terdakwa Suripan bin Wadiran dalam melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu, melakukannya lebih dari satu kali, yakni sampai dua kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang masih

⁴ Roeslan Saleh, *Stail Sel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hal. 1

memenuhi ketentuan dari pasal 244 dan 245 KUHP dan masih dalam satu jenis kejahatan yakni pengedaran uang palsu serta barang bukti yang di saksi ahli yang di datangkan oleh pihak Pengadilan untuk memperkuat dasar putusan pertimbangan hakim.

Demikianlah perolehan data putusan dari beberapa kasus tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NOMOR 1072/PID/B/2004/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA

PENGEDARAN UANG PALSU

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/PID/B/2004/PN.SMG yang Berkaitan dengan KUHP pada Pasal 245 tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Sebelum majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan terdakwa Suripan bin Wadiran yang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu. Pengadilan Negeri Semarang terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dan juga dapat membuat terdakwa jera dan menyesali segala perbuatan yang dilakukan. Bahwa dasar pertimbangan uang palsu menurut pasal 245 KUHP dan keputusan pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan saya juga setuju dengan putusan di atas, sebab si terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kejahatan yang sama dan hukuman tersebut lebih berat dari sebelumnya atau yang disebut dengan residivis uang palsu karena kejahatan tersebut sangat *meresahkan masyarakat*.

Berdakwa dengan pemindahan kita tidak lepas dari tugas penegak hukum yang dalam hal ini khususnya adalah hakim, yang mempunyai tugas berat tapi mulia.

Bahwa demikian beratnya tugas hakim karena dalam mengadili suatu perkara ia harus mempertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Peranan hakim dalam perkara pidana adalah memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan sistem pembuktian sesuai yang ditentukan hukum acara pidana itu sendiri sampai dimana putusnya akan dinilai tidak saja oleh pelaku tindak pidana akan tetapi lebih baik dari itu juga masyarakat.¹

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak akan melebihi batas maksimum seperti yang tersebut dalam KUHP. Dalam praktek pengadilan ternyata banyak putusan-putusan hakim jauh dibawah ketentuan *maksimum* tersebut dan hal itu memang tidak dilarang ilmu pengetahuan maupun undang-undang.²

Selanjutnya dalam menjatuhkan suatu putusan dalam pertimbangan hukum seorang hakim di samping berpedoman pada ketentuan perundang-undangan juga akan di pengaruhi oleh keadaan-keadaan terdakwa yang di adili yang keadaan tersebut dapat memberatkan atau meringankan, dimana biasanya hal tersebut akan di muat dalam putusannya. Banyak hal yang dapat memberatkan hukuman misalnya, terdakwa sudah pernah di hukum dan seterusnya. Sebaliknya sebagai hal yang meringankan misalnya, terdakwa masih muda, mengaku terus terang dan belum pernah di hukum dan seterusnya.³

¹ A. Karim Nasution, *Masalah Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Pancuran Tujuan, Cetakan Ke II, 1981, hlm. 219.

² *Ibid*, hlm.220.

³ Bambang Waluyo. *Pidan dan Pemidanaan*, Jakarta: Snar Grafika, 2004, hlm. 65.

Suatu hal yang amat penting adalah juga mengenai keyakinan seseorang hakim untuk menyimpulkan terbukti bersalah atau tidaknya terhadap seseorang terdakwa yang sedang diadili. Bukan keyakinan hakim ini akan menominasi suatu kesimpulan terbukti atau tidaknya seseorang dihadapkan di muka sidang, sebab sekalipun alat-alat bukti berupa saksi-saksi surat maupun yang lain telah banyak diajukan, akan tetapi belum tentu dapat menghukum seorang terdakwa tanpa disertai keyakinan hakim.⁴

Sebelum sampai pada pokok permasalahan ketentuan perundang-undangan tindak pidana pengedaran uang palsu kiranya terlebih dahulu memperhatikan sistematika dari KUHP itu sendiri agar dapat diketahui termasuk dalam kategori manakah tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut.

Bahwa sistematika KUHP kita dibagi menjadi tiga buku yakni:

Buku I : Mengatur tentang ketentuan umum tersebut dalam pasal 1 sampai pasal 10 KUHP

Buku II : mengatur tentang kejahatan tersebut dalam pasal 104 sampai dengan pasal 244 KUHP

Buku III : mengatur tentang pelanggaran tersebut dalam pasal 489 sampai dengan 569 KUHP

Adapun ketentuan tindak pidana pengedaran uang palsu diatur dalam pasal 244 dan 245 KUHP dan ternyata termasuk dalam buku ke II KUHP

⁴ Suryono Sutarto, Sudarsono, *Hukum Acara Perdata I-II*, Semarang: Yayasan cendikia Purna Dharma, 1999, hlm. 43-50.

tentang kejahatan, dengan demikian tindak pidana pengedaran uang palsu adalah kejahatan.

Secara yuridis seseorang baru dapat dikatakan bersalah atau melanggar hukum apabila ia berbuat atau melakukan suatu percobaan yang memenuhi unsur-unsur suatu delik yang telah diatur dalam KUHP, yang untuk tindak pidana pengedaran uang palsu di atur dalam pasal 244 KUHP.⁵

Sebelum membahas ketentuan perundang-undang tersebut khususnya ketentuan pasal 244 KUHP terlebih dahulu penulis akan meninjau pengertian uang sesuai dengan pokok permasalahannya ini. Mengenai uang menurut pendapat saya, bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat tukar untuk barang-barang lain, pada daerah tertentu, hingga dengan demikian uang juga digunakan sebagai alat pengukur atau penghimpun kekayaan dalam suatu wilayah tertentu.⁶

Maksud pasal 245 KUHP sebagai obyek dari kejahatan adalah uang palsu, dimana uang palsu tersebut diedarkan seakan-akan asli bukan yang palsu.⁷ Sedang perbuatan menyimpang berarti mempunyai persediaan uang palsu yang mana uang itu ada dalam pasal 245 KUHP tersebut

⁵ Barang siapa meniru atau memalsu mata uang kertas yang dilakukan dikeluarkan oleh negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun), Moelyono, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.KUHP*, cetakan ke-19, hlm. 89.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 13.

⁷ Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, taupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun), *ibid.*, hlm. 90.

mengutamakan pada pelakunya baik mengedarkan ataupun menyimpan uang palsu tersebut hingga tidak perlu bahwa pelaku itu membuat uang palsu tersebut.

Dengan ancaman pidana yang cukup berat terhadap tindak pidana uang palsu dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepentingan yang terdiri dari kepercayaan masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Bahwa seseorang melakukan tindak pidana memalsu uang itu juga erat kaitannya dengan teori sebab dan akibat dalam arti bahwa tanpa suatu sebab seseorang tidak akan membuat uang palsu dan sebab itu tidak hanya saja melainkan rangkaian dari sebab-sebab yang menimbulkan suatu akibat. Oleh karenanya tetaplah apa yang dikemukakan oleh Bacon bahwa, untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya adalah mengetahui sesuatu dengan sebenarnya adalah mengetahui sebab-sebabnya (*veresciere est causas scare*).⁸

Selanjutnya dikatakan bahwa, untuk mengetahui sebab suatu perbuatan pidana dapat dikatakan agak sukar karena harus dilihat dari faktor-faktor pribadi, lingkungan dan pengaruh lainnya, seperti riwayat hidupnya sejak kecil.⁹

Dari uraian tersebut di atas, maka yang dapat disimpulkan ialah bahwa akibat beredarnya uang palsu atau pemalsuan uang akan sangat berpengaruh dalam masyarakat baik dari segi perekonomian, sosial, keamanan, maupun politik dan kesemuanya akan menimbulkan keresahan.

⁸ W.A Boger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemah RA. Koesnan, Jakarta: PT. pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 21.

⁹ *Ibid*, m hlm. 134.

Akibat lebih luas lagi dapat mengganggu stabilitas negara dan akan berpengaruh untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Proses dalam pemeriksaan sidang sudah sesuai yaitu dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara pidana, diantaranya yaitu:

Proses persidangan perkara 1072/PID/B/2004/PN.SMG terjadi 7 (tujuh) kali persidangan. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 19 juli 2004 yang dilangsungkan di ruang sidang pada hari Rabu tanggal 4 Agustus setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim ketua, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.

Sidang ke dua pada bulan juni 2004, setelah saya mendapatkan pesanan dan menerima uang asli dari saudara Zaini sebanyak Rp. 600.000,- selanjutnya saya menemui saudara Suripan dan menyerahkan uang asli sebanyak Rp. 500.000,- selanjutnya saudara Suripan menyerahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- kepada saya sebanyak 1. 500.000,- dengan perbandingan 1 uang asli 3 uang palsu yang diperiksa oleh menyidik Bapak Muhaimin.

Sidang ke tiga, seorang saksi dan para penyidik Bapak Suyono, SH. Seorang saksi menjelaskan kepada penyidik bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan setelah dilihat dan diteliti saya masih ingat barang bukti 191 lembar mata uang kertas negara RI pecahan Rp. 100.00,- lembar mata uang kertas negara Indonesia Rp. 50.000,- yang diduga palsu saya sita dari saudara Suripan yang menurut keterangannya sebagai

pesanan dari saudari Andi Khodrin Haryono semuanya disita pada tanggal 23 Juli 2004 di desa Tampingan ke Boja.

Sidang ke empat, jaksa penuntut umum dan para pihak penyidik mendatangkan saksi ahli dari bank Indonesia agar pihak pengadilan mengetahui ciri-ciri dari uang palsu tersebut agar mempermudah proses persidangan.

Sidang ke lima, bahwa terdakwa Suripan bin Wadiran dalam proses persidangan tidak pernah dipaksakan si terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya.

Sidang ke enam, si terdakwa setelah BPAP lanjutan ini dibuat maka hasil dibacakan kembali dihadapan yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan yang diperiksa membenarkan semua keterangannya, untuk menguatkan yang diperiksa harus membenarkannya melalui tanda tangan si terdakwa.

Sidang ke tujuh, demikian BPAB tersangka dibuat dengan sebenarnya berdasarkan kekuatan sampai jabatan, kemudian di tutup dan ditanda tangani oleh jaksa penuntut umum saudara Bapak Sofyan Hidayat, SH., dan Saudari Mutia SW, SH., dan para pihak penyidik yang sudah membantu jalannya proses persidangan.

Dari keterangan proses persidangan di atas, sudahlah sangat benar karena dalam proses persidangan si terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya selama ini, apalagi dalam persidangan majelis hakim mendatangkan saksi ahli untuk mengetahui apakah benar yang didarkan si

terdakwa apa itu uang palsu atau tidak, karena yang dilakukan si terdakwa itu sangat merugikan uang negara.

Setiap putusan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa setelah melihat putusan tersebut di atas, terlihat bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni:

1. Putusan pemidanaan
2. Putusan pembebasan
3. Putusan pelepasan

Putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pemidanaan. putusan pemidanaan adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa masuk pada pasal 244 dan 245 pidana tentang pengedaran uang palsu.

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa terdakwa terbukti kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Permasalahannya adalah mengapa Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Memperhatikan dari apa yang telah diuraikan dalam keputusan Pengadilan Negeri Semarang, terlihat jelas dan meyakinkan bahwa baik penuntut umum maupun para hakim tinggi anggota majelis ternyata mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dalam mengedarkan uang palsu.

Beberapa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting untuk menyelesaikan masalah.
2. Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, hakim tidak mencari hasil dari mereduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, tetapi dari resultante dari perbuatan menimbang semua kepentingan dari nilai dalam sengketa.
3. Bahwa pada dasarnya, masalah perekonomian masyarakat menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan.

Perlu juga para hakim atau jaksa yang menyidangkan kasus tersebut memperhatikan beberapa syarat, bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi tiga unsur yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang.
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijke*)
3. Harus ada kesalahan dari pelaku

Sedang unsur-unsur kesalahan dalam pengertian pidana adalah bila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bersifat bertentangan dengan hukum
2. Akibatnya dapat dibayangkan atau dapat diduga
3. Akibatnya (sebenarnya) dapat dihindari atau sifat hati-hati dan
4. Dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan padanya

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/PID/B/2004/PN.SMG tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Kasus dari terdakwa Suripan bin Wadiran sangat meresahkan masyarakat, khususnya pada perekonomian. Dimana pada masa-masa lalu si pelaku dalam mengedarkan uang palsunya seakan-akan hidup terisolir dan tidak tersentuh hukum.

Pengertian istilah pengedaran uang palsu atau yang dipalsukan itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang membuat sesuatu menjadi tidak tulen. Terhadap pengertian yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, hal ini disamping mengedarkan, pengedaran sendiri melakukan perbuatan meniru atau membuat uang palsu.¹⁰

Kejahatan pengedaran uang palsu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka dapat diberi sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Kesan kurang baik tersebut ditimbulkan karena, dalam mengedarkan uang palsunya yang mana dianggap suatu sikap tindak pidana yang buruk.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986, hlm. 23.

Padahal faktor pidananya tersebut harus dibuktikan kebenarannya melalui proses sidang di pengadilan.

Seperti dalam kasus si terdakwa Suripan bin Wadiran dalam mengedarkan uang palsu dan kejahatan ini termasuk tindakan kriminal, karena sebelumnya si terdakwa juga pernah melakukan kejahatan yang serupa yaitu mengedarkan uang palsu.¹¹

Suripan bin Wadiran umur 47 tahun telah terbukti mengedarkan uang palsu berupa 191 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 1 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- dirampas untuk dimusnahkan dan si terdakwa diancam dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun potong tahanan.

Kesimpulan berdasarkan kejadian tersebut dapat diartikan bahwa pidana tidak dapat dihindarkan karena *meresahkan masyarakat*, walaupun harus diakui bahwa pembedaan tersebut memang merupakan pertahanan terakhir dan perbuatan tersebut juga *merugikan perekonomian negara*.¹²

Rasulullah SAW. telah menerangkan sistem yang seharusnya diberlakukan oleh seorang hakim dalam peradilan, yaitu dengan cara:¹³

1. Menggunakan kitab Allah
2. Sunnah Rasul-Nya
3. Pendapat diri sendiri

Kesimpulannya adalah apabila hakim memutuskan suatu masalah jalan yang ditempuh pertama kali adalah dengan menggunakan kitab Allah,

¹¹ Dokumen Keputusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1072/PID/B/2004/PN.SMG.

¹² *Ibid.*

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin 'Fiqih Sunnah' Jilid 4, Jakarta: Cempaka Putih, 2006, cet. 1, hlm. 341.

apabila hakim tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah maka menggunakan sunnah Rasul-Nya dan apabila tidak mendapatkannya di dalam sunnah Rasulul-Nya maka dapat dengan pendapatnya sendiri.

Seroang hakim diwajibkan untuk berlaku sama anatra kedua pihak yang bersengketa dalam lima hal yaitu:¹⁴

1. Kesamaan memasuki peradilan
2. Kesamaan duduk bagi keduanya
3. Kesamaan penerimaan bagi keduanya
4. Kesamaan mendengarkan antara keduanya
5. Kesamaan menghukumi keduanya

Menurut pakar ulama, hukum adalah perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan muslim dewasa, baik berupa tuntutan untuk berbuat, pilihan maupun praktek hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat dan halangan-halangnya. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa sumber hukum adalah Allah SWT. Dan unsur hukum yang dibahas pada kesempatan ini hanya dua, yaitu hakim (penentu dan pembuat hukum) dan perbuatan hukum (*fi'l al-mukallaf*).¹⁵

Hukum yang hidup di masyarakat belum tentu dapat ditegakkan, karena hukum yang hidup di masyarakat juga bergantung pada penegakan hukum di masyarakat.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 344.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Hukum Islam dalam Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Bandung: Benang Merah Press, 2006, hlm. 20-21.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

Sebelum penulis menguraikan obsesi penerapan hukum pidana Islam (*ta'zir*) terhadap tindakan pengedaran uang palsu di Semarang Jawa Tengah, maka tidak ada salahnya apabila penulis mengemukakan beberapa teori hukum pidana. Karena dalam hal ini si terdakwa Suripan bin Wadiran bisa disebut dengan kejahatan kriminal pengedaran uang palsu.

Teori kemutlakan adalah teori yang membenarkan adanya hukuman kepada pelaku tindak pidana baik yang bersifat kejahatan maupun yang bersifat pelanggaran. Adanya hukuman itu berasaskan legalitas dan berdasarkan akibat dari tindak pidana.

Sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Muntaqa:

:

()

Artinya: "*Dari Abdullah bin Amr al-Madini, ia berkata: Rasulullah SAW. melarang kita merusakkan mata uang yang berlaku di kalangan muslimin, terkecuali jika ada pemalsuan.*" (HR. Ahmad al-Muntaqa).¹⁷

1. a. Hadits diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan didhaifkan oleh Ibnu Hibban karena dalam sanadnya terdapat Muhammad ibnu Khadla'.
- b. Menyatakan bahwasanya mata uang itu ternyata palsu
2. Al-Imam Yahya dalam kitab *al-Bahar* berkata: apabila seseorang menjual barang dengan menggunakan mata uang, kemudian penguasa membatalkan berlakunya mata uang tersebut sebelum si pembeli sempat membayar, dari Abdullah bin Amr al-Madini berpendapat bahwa si

¹⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 7, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 115.

pembeli tetap dapat membayar dengan uang tersebut. Namun ada juga di kalangan muslim yang berpendapat bahwa harus dibayar dengan mata uang baru yang menggantikannya.

3. Dengan jelas dapat diketahui bahwa hadits ini menyatakan bahwa syara' tidak membenarkan penguasa membatalkan berlakunya sesuatu jenis mata uang secara mendadak, dengan tidak memberi tenggang waktu yang cukup untuk menarik uang itu dari peredaran.¹⁸

Kalangan ulama berselisih pendapat tentang orang yang menukarkan dinar-dinar dengan dirham-dirham, lalu ia mendapatkan salah satu dirham yang palsu, dan kemudian bermaksud mengembalikannya. Menurut pendapat Imam Malik, jual beli tersebut menjadi rusak. Jika terdapat banyak dinar, maka rusaklah satu dinar karena satu dirham atau lebih hingga mencapai satu dinar, jika tambah satu dinar atas dinar, maka rusaklah dinar yang lain. Begitulah antara satu dirham dan hingga mencapai satu dinar.¹⁹ Imam Malik berkata “Jika orang tersebut rela terhadap dirham yang palsu, maka tidak ada satupun yang batal dari jual beli tersebut.”

Imam Abu Hanifa berpendapat, bahwa jual beli mata uang tidak menjadi rusak karena dirham palsu itu separuh atau lebih dari jumlah dirham. Jika dikembalikan maka jual beli mata uang menjadi batal pada bagian pada bagian yang dikembalikan. Dan jika uang-uang palsu dikembalikan maka pihak yang mengembalikan boleh memilih sejumlah itu dalam dinar-dinar, yakni bagi pemilih dinar-dinar, menurut pendapat saya dengan persyaratan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁹ MA Abdurrahman, Ibnu Rusdy, *Terjemah Bidayatul Mudjtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990, hlm. 149.

ulama' di atas tidak semuanya benar karena perbuatan di atas sangat bertentangan dengan syari'at Islam dan hukumnya juga haram dilakukan perbuatan pengedaran uang palsu atau dipalsukan dalam jual beli uang.²⁰

Dalam syari'at Islam perbuatan terdakwa tergolong *jarimah ta'zir*, pengertian *ta'zir* adakah memberi pengajaran (*at-ta'bid*), tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri seperti yang akan kita bahas di bawah ini, syari'at tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya dalam hal ini hakim diberi, dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan *jarimah ta'zir*.²¹

Putusan pengadilan negeri Semarang nomor 1072/PID/B/2004/PN. SMG tentang tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Suripan bin Wadiran dengan hukuman pidana denda sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah) subsidair kurungan 5 (lima tahun). Dalam hukum pidana Islam adalah merupakam *jarimah ta'zir* kerana *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu. Dari hukuman yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Sedangkan hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu pasal 245 tentang pengedaran uang palsu adalah paling singkat 2,5 (dua setengah) boleh atau paling lama 15 (lima belas)

²⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

²¹ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 7.

tahun atau denda paling sedikit Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Jadi, berdasarkan uraian diatas, menurut analisa penulis putusan pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Suripan bin Wadiran sudah dipertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa. Hal ini sesuai dengan syari'at hukum pidana Islam. Sebelum hakim menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa. Agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan juga tidak merugikan masyarakat, apalagi kejahatan pengedaran uang tidak hanya dilakukan di kota Semarang tetapi di kota-kota besar sudah banyak kejadian serupa maka itu kita harus waspada agar tidak dirugikan seseorang yang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.

Salah satu masalah fundamental dalam menentukan jumlah hudud dan definisinya masing-masing adalah dari mana menjabarkannya. Apakah hudud itu hanya terbatas pada pelanggarannya yang hukumannya secara tegas ditetapkan dalam al-Qur'an atau pelanggaran yang sanksi hukumnya disebut dalam as-Sunnah. Sebagian ahli hukum perintis, mengatakan hudud merupakan pelanggaran yang hukumannya ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Menurut pandangan ini hudud ada 6 yaitu: *zina*, *qazaf*, *sariqah*, *asy-syirkah*, meminum *khamr* dan *hirabah*, sudah dijelaskan detail dalam nash al-Qur'an sebagai perbuatan di atas tidak menimbulkan penafsiran yang

berbeda-beda dengan hukuman pidana Islam. Sedangkan tindak pidana pemalsuan uang dalam nash tidak diatur secara jelas dalam hukum pidana Islam. Karena tindak pidana ini termasuk perbuatan maksiat. Larangan pemalsuan uang orang lain dengan cara batil baik penyelenggaraan negara, hakim maupun masyarakat, karena akibat negatif yang ditimbulkan dari uang palsu dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu dalam al-Qur'an dan hadits tidak disebutkan sanksi hukumnya dikenai *had*, *qisas*, *diyat*. Maka para fuqaha menjelaskan tindak pidana pengedaran uang palsu dikenai sanksi *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan sedang pelaksanaannya diserahkan dalam ijtihad para hakim.

Untuk menentukan *wali al amri* dalam memutuskan yang tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun hadits, maka *wali al amri* menetapkan suatu sistem *al-maslahah*. Pada dasarnya tujuan awal dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan (*mafsadah*) untuk menarik manfaat dan menolak mudharat bagi seluruh umat.²² Kemaslahatan umat manusia itu sifatnya aktual tidak ada habisnya karena jika tidak ada syariat hukumnya yang berdasarkan *kemaslah-mursalah* yang berhubungan dengan masalah baru dan tuntutan perkembangan zaman, maka pembentukan hukum hanya terkunci berdasarkan *maslahah* yang mendapatkan penegakan suara'. Maksudnya apabila hukum itu hanya terpaku yang ada dalam al-Qur'an dan hadits saja,

²² Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: t.p., 1999, hlm. 52.

tidak memperhatikan permasalahan yang mungkin timbul di masa sekarang maupun di masa yang akan datang maka hukum Islam tidak universal. Hukum mengenal kejadian, peristiwa atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash dan *ijma'*.²³

Adapun ketentuan pidana *ta'zir* tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan maksudnya penentu ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.²⁴

Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan suatu kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara' diserahkan kepada penguasa dan *ulil amri* di setiap manusia dan tempat, karena hukuman *ta'zir* ini terbuka luas dan masing-masing ahli *ijtihad* maupun para hakim dapat mengembangkan *ijtihadnya*.²⁵

Batas masa hukumannya ditentukan oleh taubat dan kebaikan pelaku jika pelaku sudah taubat dan baik maka tidak perlu hukumannya diteruskan. Sebaliknya jika pelaku belum taubat serta belum baik maka hukuman diteruskan hingga bertaubat dan menjadi baik. Bahkan bagi pelaku *jarimah* yang berulang kali dan tidak ada harapan untuk bertaubat dan berlaku baik dapat dijatuhkan hukuman mati agar tidak mengganggu ketentraman masyarakat.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Al-Majalisu al-A'la al-Indonesia li Da'wati al-Islamiah, t.th, hlm. 85.

²⁴ Hanafi, *op.cit.*, hlm. 340.

²⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. I, 2001, hlm. 122.

Dalam *jarimah ta'zir*, seorang hakim boleh memilih suatu hukuman sesuai dengan macamnya *jarimah ta'zir* dan perbuatannya dari kumpulan yang disediakan untuk *jarimah ta'zir* juga bisa mempergunakan hukuman maupun memperberatnya.²⁶

Bahwa syariat Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak jelaskan dalam al-Qur'an maupun hadits dengan *ta'zir* tindak pidana pemalsuan uang dalam hukum Islam termasuk *ta'zir* yang mana *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *ulil amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa memandang pelakunya baik pejabat maupun masyarakat biasa dan harus tunduk kepada syariat Islam dan mematuhi hukum Allah.²⁷

Tujuan pokok hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat *jarimah*. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai, para pelaku *jarimah* itu bermacam-macam di antaranya ada yang mau tercegah setelah dihukum berat. Dengan demikian hukumannya yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah (jarimah ta'zir)* bisa berbeda-beda meskipun perbuatannya sama.²⁸

Dalam hukum Islam masalah pengedaran uang palsu tidak diatur secara jelas dan dikenal dengan istilah *ijtihad* atau *ra'yu* (akal pikiran),

²⁶ Hanafi, *op.cit.*, hlm. 10.

²⁷ Mawardi, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayyan, 2002, hlm. 23.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

dimana akal pikiran manusia yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga adalah pikiran manusia juga memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar seluruh kemampuan yang ada padanya dalam upaya memahami kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi Muhammad SAW dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.²⁹

Salah satu unsur bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana) apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melanggar perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.³⁰

.

Artinya: *Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau pemindahan hukum.*³¹

Artinya: *Mengubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.*³²

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Hukum Islam)*, Jakarta: Rajawali, 1991, cet. II, hlm. 100.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, cet. I, hlm. 29.

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

³² *Ibid*, hlm. 160

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/pid/B/2004/PN.SMG tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tugas seorang hakim untuk dapat mewujudkan suatu putusan yang bertujuan menegakkan hukum, keadilan namun juga putusannya harus dapat dirasakan adil oleh masyarakat, dan untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah perlu bagi seorang hakim untuk tidak saja menguasai aturan perundang-undangnya saja, tetapi harus dapat menyerap aspirasi masyarakat tuntutan masyarakat terhadap suatu keadilan.

Tetapi sebenarnya meskipun terjadi perbedaan penjatuhan pidana dalam suatu kasus yang sama, hal yang demikian belum tentu dapat dikatakan sebagai suatu ketidakadilan karena permasalahannya adalah kasuistik yang menyangkut kebebasan dan keyakinan seorang hakim.

Menurut majelis hakim dalam isi putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang pengedaran uang palsu sudah sangat relevan karena si terdakwa Suripan bin Wadiran telah melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu dan terkena sanksi ancaman pidana menurut pasal 245 KUHP, apalagi si terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kejahatan yang

serupa (*residivis*) di daerah Pati dengan hukuman penjara 2,5 tahun penjara. Dan juga meresahkan perekonomian negara serta merugikan masyarakat, dalam putusan di atas dalam mengenal sanksi ancaman 8 (delapan) tahun potong tahanan menjadi 5 tahun penjara dan dikenai ganti kerugian sebesar Rp. 2.000,-.

Bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu adalah seperti halnya tindak pidana yang lain yang harus memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana pada pasal 244 dan 245 dan dikenakan sanksi bagi pelakunya dengan hukuman penjara 15 tahun.

Kejahatan pengedaran uang palsu adalah kejahatan yang dilaksanakan seseorang dengan membuat mata uang atau uang kertas, atau uang kertas Bank dengan mengusahkan agar sesuai dengan aslinya. Dan ini sangat berbahaya, apabila kalau sempat beredar secara luas dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian negara itu sendiri dan lebih berbahaya bagi kepercayaan masyarakat terhadap uang yang sah akan menurun atau hilang karena akan selalu ragu-ragu terhadap uang yang dimilikinya.

2. Bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang kepada terdakwa Suripan bin Wadiran, menurut hukum pidana Islam terdakwa termasuk melakukan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya, hukuman *jarimah ta'zir* menyebutkan dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih

hukuman yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya. Hal ini juga sesuai dengan hukum yang dijatuhkan pengadilan Negeri Semarang karena terdakwa merupakan pengedar uang palsu.

Bahwa syariat Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak jelaskan dalam al-Qur'an maupun hadits dengan *ta'zir* tindak pidana pemalsuan uang dalam hukum Islam termasuk *ta'zir* yang mana *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *ulil amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa memandang pelakunya baik pejabat maupun masyarakat biasa dan harus tunduk kepada syariat Islam dan mematuhi hukum Allah.

B. Saran-saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan saran-saran kepada aparat pelaksana penegak hukum secara khusus, dan masyarakat pada umumnya demi tercapainya usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Hal tersebut diharapkan untuk dapat menekan dan kalau mungkin menghapuskan sama sekali tindak pidana pengedaran uang palsu, di antaranya yaitu:

1. Dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu, dimana apabila ada warga masyarakat menerima uang dan diragukan keasliannya hendaknya segera melapor kepada yang berwajib.

2. Faktor penyebab tindak pidana pengedaran uang palsu pada umumnya dikarenakan adanya tekanan ekonomi yang mendesak disamping dari faktor pengaruh lingkungan. Oleh karena itu pemerintah hendaknya dapat memperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak lapangan kerja, misalnya dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas transmigrasi untuk membuka lapangan kerja baru.
3. Meningkatkan agar pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana pengedaran uang palsu dapat memberi putusan agar pelaku menjadi jera, dengan tidak mengabaikan keadilan yang seadil-adilnya baik yang dirasakan oleh pelakunya maupun oleh masyarakat.
4. Kepada pihak lembaga pemasyarakatan hendaknya dapat secara khusus memberikan pengarahan-pengarahan kepada nara pidana pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu tentang bahaya perbuatannya itu terutama di lihat dari segi hukum Islam karena menyangkut kemaslahatan umat dan juga merugikan perekonomian masyarakat dan negara.

C. Penutup

Sebagai akhir kata penulis mengucapkan syukur alhamdulillah dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dan harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ibnu Rusdy, *Terjemah Bidayatul Mudjtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Hukum Islam)*, Jakarta: Rajawali, 1991, cet. II.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Anwar, Moch, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: 1986.
- _____, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni, 1982.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shidieqy, M. Hasib, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Asy-Asyafi'i, Al-Imam, RA. *Terjemah Al-Umm, Jilid IV*, CV. Jakarta: Faizan, 1982.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tafsir Jami'y Islam*, Juz I, Bairut: Darul Kutub Arroby, tt.
- Aziz, Zainuddin Bin Abdul dan Al-Maubari al-Fananni, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid II, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Berkas Data Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2004.
- Boger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemah RA. Koesnan, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.
- Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah, (Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, RI. Direktorat Jendral Badan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, 2001.
- Damim, Sudarwan, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 30*, Surabaya: Mahkota, 1989.

Djodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

_____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.

_____, *Mata Uang Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

http://www.karawangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view

I Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariah Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: Gajah Mada, 1985.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Al-Majalisu al-A'la al-Indonesia li Da'wati al-Islamiyah, t.th.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.

Makalah Seminar dalam Buletin *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 1, April, 2006.

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Cet. Ke-20, 1999.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mawardi, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayyan, 2002.

Moelyono, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP*, Cet. 19.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian*, Bandung: Rosdakarya, 1995, Cet. 6.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: t.p., 1999.

Mujib, M, Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Muslich, Ahmad Wardi, *Himpunan Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

_____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, cet. I.

- Nasution, A. Karim, *Masalah Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Pancuran Tujuan, Cetakan Ke II, 1981.
- Pratama, Sumadji P. Yudha dan Rosita, *Kamus Ekonomi*, Wacana Intelektual, 2006.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1072/PID-B/2004/PN.PN.SMG., tanggal 16 Desember 2008.
- Rahardja, Prathama, *Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bkati, 1991.
- Rakhmadi, *Rekatulaisasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Juz X, Bandung: Penerbit Al-ma'arif, 1990.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Shazawi, Adam, *Kejahatan Mengenal Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Shihab, M. Qusish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: 2002.
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Cet. II, Bandung: 1987.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990.
- Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Surakhmad, Darmanto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar I*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sutarto, Suryono dan Sudarsono, *Hukum Acara Perdata I-II*, Semarang: Yayasan cendikia Purna Dharma, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 dan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2007 tentang Bank Indonesia, Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 1992.

Waluyo, Bambang. *Pidan dan Pemidanaan*, Jakarta: Snar Grafika, 2004.

Wojowasisto, S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Sinta Dharma, 1972.